

Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan

Pekalongan Tahun 2004 – 2013

Widhi Priyo Wasiso - 12313229

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

e-mail: widhipriyo21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dan pembuktian Hipotesis Kuznets mengenai kurva “U” terbalik di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dalam periode waktu 10 tahun mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 10 tahun data observasi mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Data di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, dan Hipotesis Kuznets “U” terbalik.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 7 kabupaten/kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan terbagi menjadi empat kategori, yaitu: daerah makmur, daerah tertinggal dalam proses membangun, daerah makmur yang sedang menurun, dan kategori daerah tertinggal. Hasil perhitungan indeks ketimpangan Williamson adalah nilai ketimpangan PDRB yang terjadi di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mengalami kenaikan secara terus menerus. Sedangkan untuk indeks ketimpangan Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan hasilnya fluktuatif. Dalam penelitian ini hipotesis Kuznets belum terbukti di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dengan menunjukkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson dan indeks ketimpangan Entropy Theil.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, hipotesis kuznets.

PENDAHULUAN

Proses pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting karena dapat dipakai untuk menilai kinerja perkembangan

perekonomian suatu negara atau daerah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi merefleksikan perkembangan tingkat kegiatan ekonomi secara dinamis dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus dalam jangka panjang yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang menjadi indikator moneter, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, melek huruf, kesejahteraan dan kemakmuran (Arsyad, 2010). Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik juga diperlukan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal meningkatnya pendapatan perkapita, tetapi juga distribusi pendapatan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi sendiri diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

Salah satu faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Modal yang ditanamkan dalam suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan produktifitas yang dapat menyebabkan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dengan meningkatnya PDRB maka secara langsung pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Ukuran pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Banyak faktor yang menyebabkan setiap daerah memiliki PDRB yang berbeda, seperti modal yang ditanamkan pada daerah tersebut, sumber daya yang dimiliki, dan infrastruktur yang tersedia. Ditambah dengan perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan tidak selalu terjadi dengan merata. Kesenjangan daerah menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, namun di beberapa daerah lain mengalami hal yang berbeda yaitu mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan di karenakan sumber-sumber yang dimiliki daerah tersebut. Seperti adanya penanam modal lebih cenderung menanamkan modalnya di daerah yang memiliki fasilitas infrastruktur yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar daerah di Eks Karesidenan Pekalongan serta untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznets berlaku di Eks Karesidenan Pekalongan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Adapun alat analisis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi daerah tertinggal (Arsyad, 2010). Pada tahun 1965 Leo Klassen menciptakan model ini untuk memecahkan permasalahan regional yaitu permasalahan daerah-daerah tertinggal atau terbelakang. Kriteria yang digunakan dalam analisis ini dibagi menjadi empat, diklarifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tipe I yaitu daerah makmur adalah daerah yang memiliki prospek yang baik dalam pertumbuhan ekonomi di masa mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat setempat.
 - b. Tipe II adalah daerah tertinggal dalam proses membangun. Permasalahan yang terjadi di daerah ini adalah memiliki pendapatan yang relatif rendah namun pertumbuhannya tinggi.
 - c. Tipe III adalah daerah makmur yang sedang menurun daerah ini mempunyai pendapatan yang tinggi namun pertumbuhan daerahnya masih rendah, daerah ini memiliki potensi untuk menjadi daerah tertinggal.
 - d. Tipe IV termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Daerah ini memiliki pertumbuhan dan pendapatan yang rendah. Pendapatan perkapita masih dibawah rata-rata daerah lain. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Diperlukan pengembangan potensi yang lebih untuk mengejar ketertinggalan di daerah ini.
2. Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Daerah menggunakan 2 jenis alat analisis, yaitu:
 - a) Indeks Ketimpangan Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah. Dalam menganalisis indeks ini dapat dilihat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2013. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004:133)

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana:

- IW = Indeks Williamson
Y_i = PDRB per kapita di kabupaten/kota i
Y = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Jawa Tengah
F_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i
n = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah

Dengan indikator bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks mendekati angka satu maka menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Lebih jelasnya terdapat tiga kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson yaitu, (Arsyad: 2010):

- a. Angka 0,0 sampai 0,2 menunjukkan ketidakmerataan suatu daerah rendah.
 - b. Angka 0,21 sampai 0,35 ketidakmerataan suatu daerah sedang.
 - c. Angka > 0,35 maka ketidakmerataannya tinggi.
- b) Indeks Entropy Theil digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto kabupaten/kota. Dengan Indeks Entropy Theil dapat dilihat apakah terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode Indeks Entropy Theil sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004:134)

$$Tp = \sum i \sum j \left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right) \log \left(\frac{\frac{Y_{ij}}{Y}}{\frac{N_{ij}}{N}} \right)$$

Dimana:

- Tp = Indeks Ketimpangan Theil
Y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten/kota j
Y = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah
N_{ij} = Jumlah penduduk kabupaten/kota j
N = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah

Indikator Indeks Theil adalah semakin besar nilai indeks Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi, sebaliknya jika nilai indeks semakin kecil artinya semakin kecil ketimpangan yang terjadi dengan kata lain pembangunan terjadi secara merata.

3. Kuznets menganalisis pola-pola pertumbuhan secara historis di negara-negara maju dan mengemukakan bahwa tahap-tahap pertumbuhan di awal distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya distribusi pendapatan akan membaik, dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulang kali dan jika digambarkan akan membentuk sebuah kurva “U” terbalik. Dari observasi yang dilakukan oleh Kuznets tersebut, kemudian dikenal secara luas tentang konsep kurva Kuznets “U” terbalik (Todaro, 2006: 253).

Arsyad (2010) pada tahap awal pembangunan pertumbuhan ekonomi biasanya terpusat pada sektor modern, jadi mengakibatkan lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitasnya tinggi. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan yang tinggi pada awalnya, namun pada akhirnya akan menyempit kembali. Dalam hal ini pembuktian kurva “U” terbalik menggunakan cara sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2004):

- Menghubungkan antara angka Indeks Williamson dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah
- Menghubungkan antara angka Indeks Enthropy Theil dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah

Dengan indikator apabila kedua angka Indeks tersebut menggambarkan kurva “U” terbalik, maka teori Kuznets berlaku, namun apabila terjadi sebaliknya, kedua angka indeks tidak menggambarkan kurva “U” terbalik, maka teori Kuznets tidak berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola dan Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

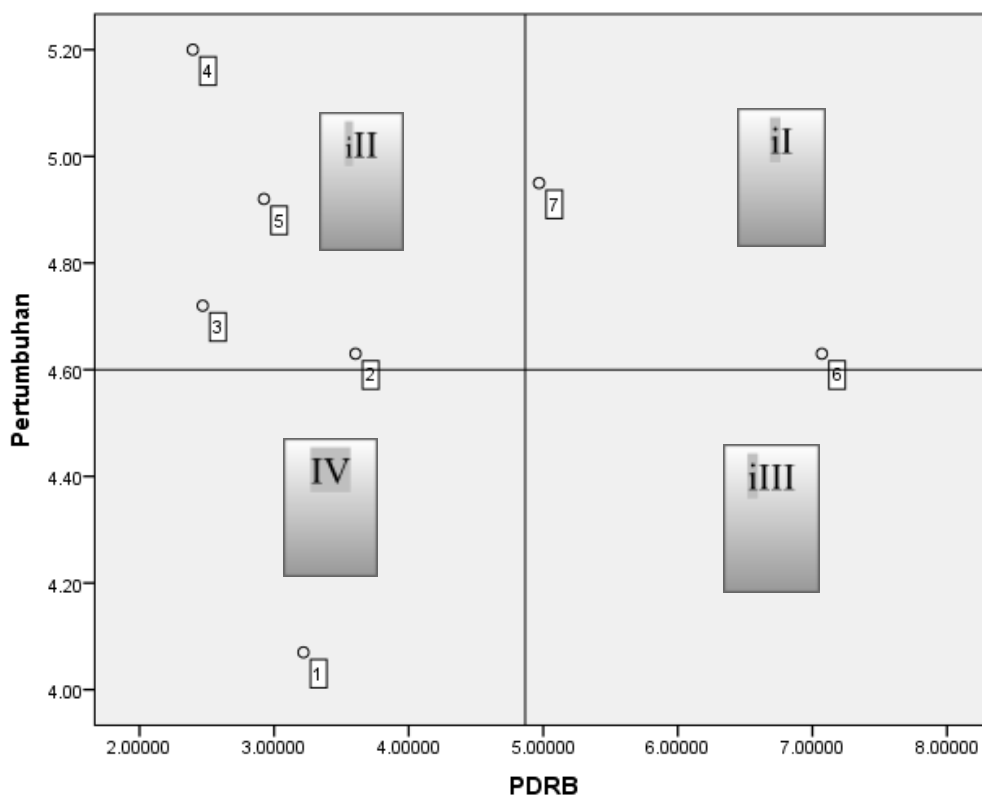
Dua indikator utama yang digunakan pada Tipologi Klassen adalah pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Penentuan klarifikasi dilakukan dengan cara memnentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB perkapita sebagai sumbu horizontal. Dua indikator tersebut dapat menghasilkan empat klarifikasi sebagai berikut: a). Tipe I yaitu daerah makmur.b). Tipe II adalah daerah tertinggal dalam proses membangun. c). Tipe III adalah daerah makmur yang sedang menurun. d). Tipe IV termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

Tabel 4.1
Rata-rata PDRB PerKapitadan Rata-Rata PertumbuhanKabupaten
diWilatahEksKaresidenanPekalongan 2004-2013

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata PDRB PerkaitaKabupaten (Juta Rupiah)	Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Kabupaten (%)
1	Kab. Batang	3.217849	4.07%
2	Kab. Pekalongan	3.604440	4.63%
3	Kab. Pemalang	2.469559	4.72%
4	Kab. Tegal	2.395910	5.20%
5	Kab. Brebes	2.924254	4.92%
6	Kot. Pekalongan	7.070440	4.63%
7	Kot. Tegal	4.968812	4.95%
	Rata-Rata	3.807323	4.73%

Sumber: Jawa Tengah DalamAngka, 2003-2013

Pada tabel 4.1 rata-rata PDRB per kapita Kota Pekalongan menempati posisi pertama yaitu sebesar Rp 7.070.440, sedangkan untuk rata-rata PDRB per kapita paling rendah sebesar Rp 2.395.910 yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal. Untuk rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi dimiliki oleh KabupatenTegalsebesar 5,20% dan rata-rata pertumbuhan PDRB terendah dimiliki oleh Kabupaten Batang sebesar 4,07%. Klasifikasi pola dan struktur perekonomian daerah di Wilayah EksKaresidenanPekalongandapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



Sumber: Lampiran Diagram Cartesius, 2017.

Gambar 4.1

**Rata-rata PoladanStrukturPerekonomian di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan
MenurutTipologiKlassenTahun 2004-2013**

Keterangan:

- ☐ Tipe I daerah makmur:(1) Kota Pekalongan; (6) Kota Tegal.
- ☐ Tipe II daerah tertinggal dalam proses membangun: (2) KabupatenPekalongan; (3) KabupatenPemalang; (4) KabupatenBrebes; (5) Kabupaten Tegal.
- ☐ Tipe III daerah makmur yang sedang menuruntidakada.
- ☐ Tipe IV kategori daerah tertinggal: (1) Kabupaten Batang.

INDEKS KETIMPANGAN

Fungsi dari Indeks ketimpangan Williamson adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah dengan melihat tingkat pemerataan PDRB (Produk Domestik Bruto) per kapita antar kabupaten. Pengukurannya adalah jika nilai indeks ketimpangan Williamson mendekati nol maka menunjukkan bahwa ketimpangan di suatu daerah semakin kecil atau perkembangan pembangunan merata, dan jika semakin menjauhi nol maka hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan semakin lebar. Hasil

perhitungan nilai indeks ketimpangan Williamson antar kabupaten/kota di eks Karesidenan Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

IndeksKetimpangan Williamson Wilayah EksKaresidenan 2004-2013

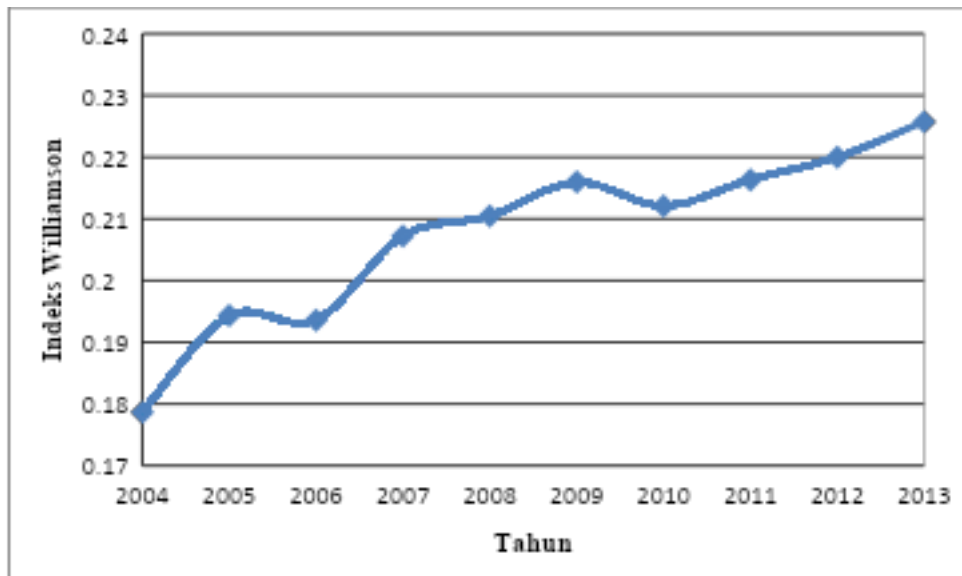
Tahun	Indeks Williamson
2004	0,178
2005	0,194
2006	0,193
2007	0,207
2008	0,210
2009	0,215
2010	0,212
2011	0,216
2012	0,219
2013	0,225
Rata-rata	0,207

Sumber: Lampiran Indeks Williamson, 2017

Dapat diketahui dari tabel bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama periode 2004-2013 mencapai 0,207 artinya bahwa ketimpangan antar kabupaten yang terjadi di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan termasuk kecil. Namun jika dilihat dari tahun 2004-2013 nilai indeks ketimpangan mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun waktu 10 tahun. Setiap tahunnya Indeks Williamson di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan meningkat rata-rata. Pernah terjadi penurunan di tahun 2010 dimana mencapai 0,212, kemudian naik setiap tahunnya. Kenaikan yang signifikan terjadi di tahun 2004 sampai 2005 kenaikannya mencapai 0,016. Nilai ketimpangan yang rendah ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan tidak menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

Grafik4.2 Indeks Williamson

Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2003-2013



Selain menggunakan indeks Williamson, Indeks Entropy Theil juga dapat digunakan untuk mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan regional antar kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Jika nilai indeks Entropy Theil semakin besar menunjukkan pula ketimpangan semakin besar dan apabila nilai menunjukkan semakin kecil maka semakin kecil pula ketimpangan terjadi.

Hasil perhitungan indeks Entropy Theil antar kabupaten/kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

IndeksEntropyTheilWilayah EksKaresidenan 2004-2013

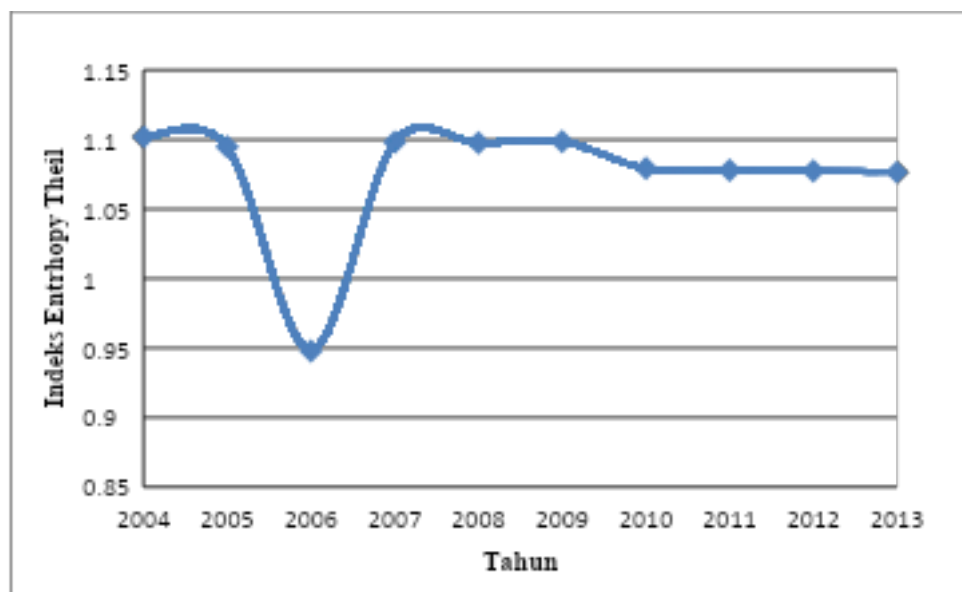
Tahun	IndeksEntropyTheil
2004	1,102
2005	1,094
2006	0,948
2007	1,098
2008	1,097
2009	1,098
2010	1,079
2011	1,078
2012	1,077
2013	1,076
Rata-rata	1,075

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan indeks Entropy Theil di wilayah eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2013 rata-rata ketimpangan sebesar 1,075. Pada tahun 2004 sebesar 1,102 kemudian turun 0,008 pada tahun 2005 menjadi 1,094. Pada tahun 2006 turun sangat signifikan sebesar 0,948 dan tahun 2007 naik sebesar 1,098. Lalu pada tahun 2008 mengalami penurunan 0,001 menjadi 1,097, tahun 2009 kembali naik menjadi 1,098. Tahun 2010 nilai indeks turun sebesar 1,079 dan pada tahun berikutnya sampai tahun 2013 mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara umum nilai indeks Entropy Theil di Wilayah eks Karesidenan Pekalongan selama tahun 2004-2013 cenderung fluktuatif dan rendah. Grafik indeks Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3

Grafik Indeks Entropy Theil

Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2013



Nilai Indeks Ketimpangan Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan jika dilihat secara rata-rata tingkat Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten mengalami ketimpangan walaupun nilainya relatif kecil, tetapi dapat dilihat bahwa nilai ketimpangan yang terjadi antar daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama tahun pengamatan 2004-2013 bersifat fluktuatif.

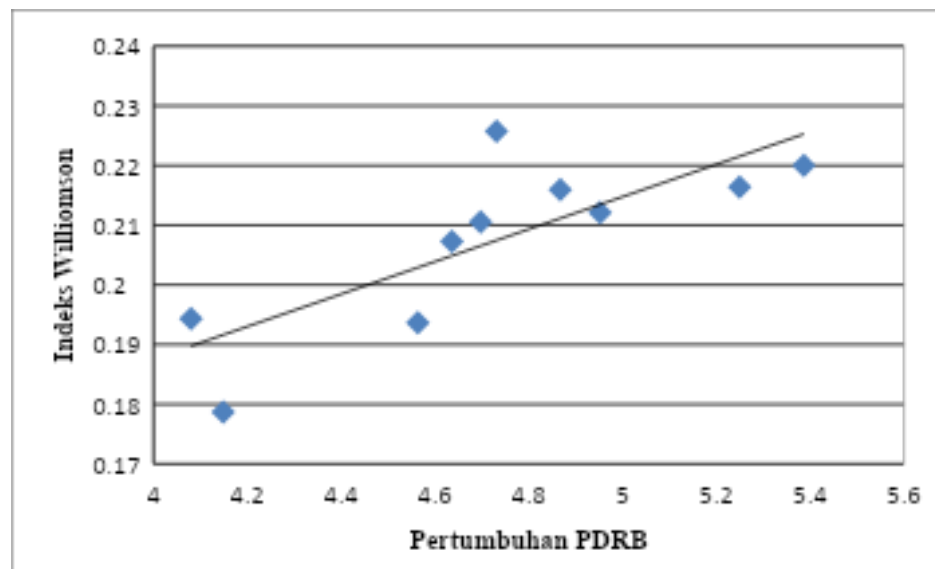
Hipotesis Kuznets

Pembuktian Hipotesis Kuznets dapat dilakukan dengan cara membuat grafik antara PDRB dengan angka indeks ketimpangan baik Indeks Williamson maupun Entropy Theil. Grafik tersebut menggambarkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson maupun pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Entropy Theil. Grafik antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dapat membuktikan berlaku atau tidak hipotesis Kuznets tentang kurva “U” terbalik. Jika menunjukan bentuk “U” terbalik maka artinya pada awal pertumbuhan ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu saat akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut terulang kembali.

Gambar 4.4

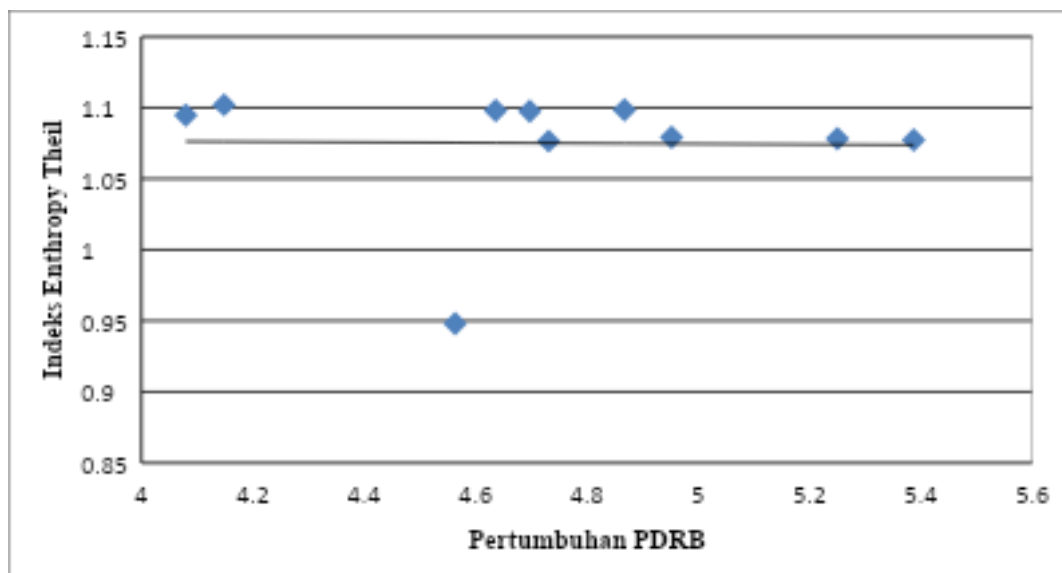
Grafik Hipotesis Kuznets Indeks Ketimpangan Williamson

dengan Pertumbuhan PDRB Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2013



Gambar 4.5

**Grafik Hipotesis Kuznets Indeks Ketimpangan Entropy Theil
dengan Pertumbuhan PDRB Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2013**



Gambar 4.4 dan 4.5 memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan Williamson dan Entropy Theil, dimana kurva “U” terbalik belum terbentuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets belum terbukti di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dengan periode waktu 2004-2013. Hal tersebut disebabkan wilayah eks Karesidenan Pekalongan masih dalam tahap awal pembangunan dan tahun observasi yang hanya 10 tahun. Tahun observasi tersebut, kurang mewakili pola ketimpangan teori hipotesis Kuznets. Jika ingin menggunakan data *time series* pada hipotesis Kuznets, maka tahun observasi yang diperlukan harus data *time series* jangka panjang.

KESIMPULAN

Daerah Eks Karesidenan Pekalongan yang masuk dalam tipe I atau daerah makmur meliputi Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Daerah tertinggal dalam proses membangun yakni meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Daerah yang makmur sedang menurun di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan tidak ada Kota maupun Kabupaten. Untuk daerah yang tertinggal hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Batang.

Selama kurun waktu 10 tahun pengamatan 2004-2013 menurut perhitungan menggunakan alat analisis indeks Williamson dan indeks Entropy Theil terjadi ketimpangan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan namun nilainya dapat dikatakan kecil.

Hasil hipotesis Kuznets antarpertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan Williamson di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets mengenai kurva “U” terbalik belum terbukti. Hal yang sama terjadi pada hipotesis Kuznets antara pertumbuhan PDRB dan indeks ketimpangan Entropy Theil di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bahwa hipotesis Kuznets mengenai kurva “U” terbalik juga belum terbukti.

SARAN

Dalam mengambil kebijakan pembangunan, setiap daerah di Karesidenan Pekalongan sebaiknya tidak terpaku membangun daerah-daerah yang berfungsi sebagai pusat perekonomian saja, tetapi juga pembangunan juga harus terdistribusi pada daerah-daerah sebagai penopang daerah pusat perekonomian dan daerah. Masalah-masalah yang terdapat pada daerah-daerah tertinggal tersebut meliputi, kemiskinan, jumlah pengangguran yang tidak sedikit, lapangan pekerjaan yang masih minim. Mobilitas dan sarana publik sangat diperlukan untuk mempermudah daerah-daerah yang masih memiliki pendapatan daerah yang relatif kecil menjual hasil sumber daya alam yang dimiliki. Mobilitas dan sarana yang publik yang baik, diharapkan menjadi daya tarik untuk investor agar menginvestasikan dananya untuk membangun sebuah industri yang dapat mempekerjakan masyarakat yang berada daerah relatif tertinggal yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah relatif tertinggal tersebut.

Pada daerah yang termasuk kategori daerah yang makmur, sebagian besar daerah tersebut nilai ketimpangan cukup besar dibanding rata-rata nilai ketimpangan Eks Karesidenan Pekalongan. Hal ini berarti terdapat distribusi pendapatan yang masih belum merata pada daerah yang tergolong makmur tersebut. Menjadi tugas pemerintah daerah untuk meminimalisir jarak antara masyarakat yang memiliki pendapatan besar dengan masyarakat yang memiliki pendapatan kecil. Pemerintah dapat melakukan pembekalan keterampilan kepada pekerja kasar yang memiliki penghasilan relatif kecil. Pembekalan keterampilan yang dilakukan, bertujuan agar pekerja memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) beberapa terbitan*, BPS Jawa Tengah.
- Sutarno, dan Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 8, No. 2, hal. 97 - 110, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Todaro, M.P. dan Smith, Stephen, C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Erlangga, Jakarta.